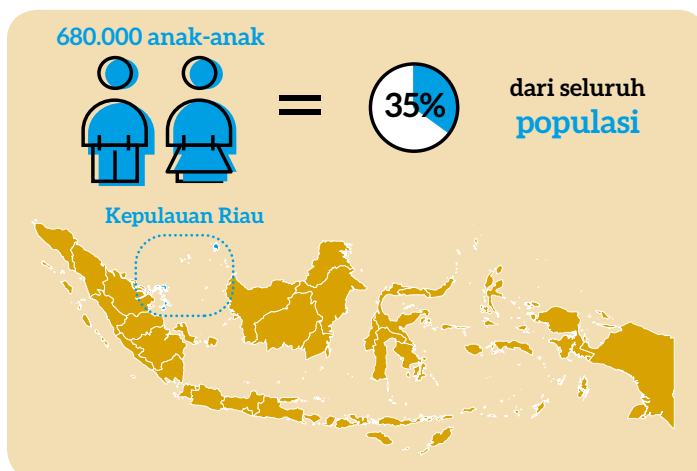




Pendahuluan

Profil singkat provinsi ini menyajikan indikator-indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak, berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya. Profil ini melengkapi *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia* yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF, untuk mendukung pemantauan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Provinsi Kepulauan Riau termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 680.000 orang atau 35 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Lebih dari delapan di antara 10 anak tinggal di wilayah perkotaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.



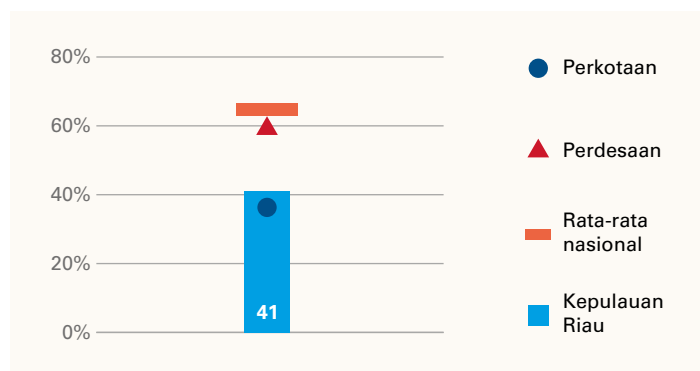
TUJUAN 1 PENGENTASAN KEMISKINAN



Sekitar 53.000 anak (7,7 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada tahun 2015 (Rp 14.750 per orang per hari). Namun, lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi kemiskinan dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu, 41 persen anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan atau lebih, dengan ketimpangan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan.¹

Kondisi kemiskinan anak multidimensi di provinsi Kepulauan Riau

	Persen	Jumlah
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional	6,2	123.000
Anak-anak < 18 di bawah garis kemiskinan nasional	7,7	53.000
Anak-anak < 18 di bawah dua kali garis kemiskinan	46,7	317.000



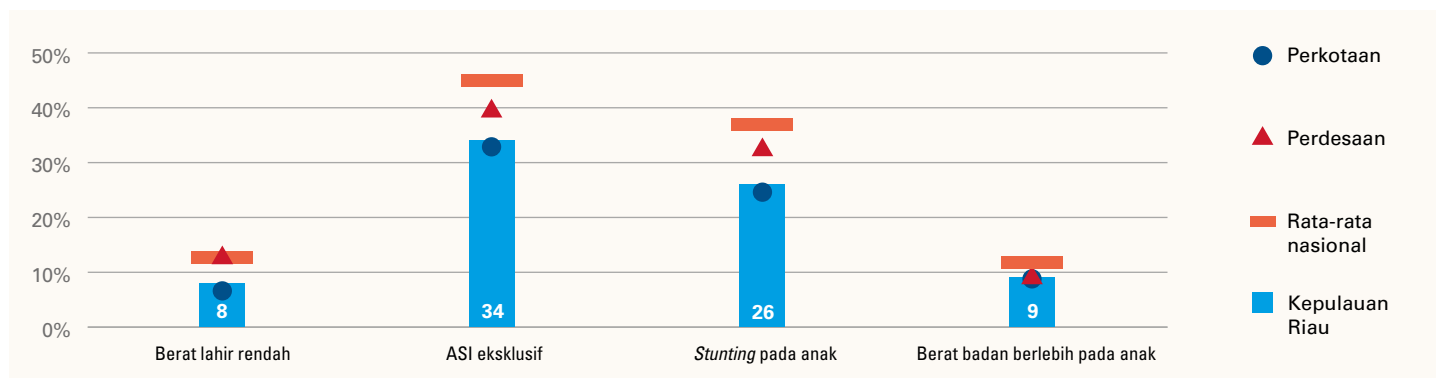
TUJUAN 2 PENGENTASAN KELAPARAN



Menerapkan praktik pemberian makan yang optimal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Namun, hanya satu di antara tiga bayi di Provinsi Kepulauan Riau diberikan ASI eksklusif pada enam bulan pertama kehidupannya, yang berarti jauh di bawah angka rata-rata nasional.

Prevalensi malnutrisi relatif tinggi, termasuk di wilayah perkotaan. Sekitar 8 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, dan lebih dari satu di antara empat anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* (tinggi badan rendah dibanding usia) pada tahun 2013.

Ketimpangan berdasarkan wilayah dalam hasil pemberian makanan dan gizi anak



TUJUAN 3

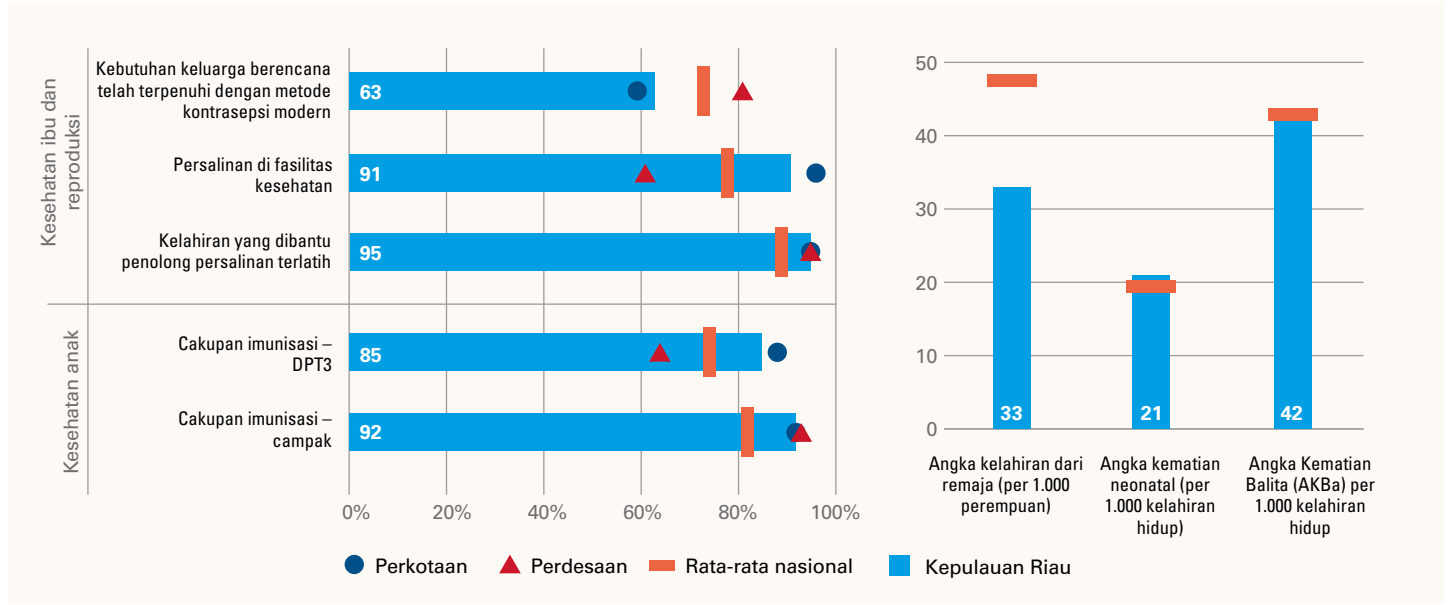
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN



Meskipun sudah ada kemajuan, angka kematian anak masih menjadi tantangan. Untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 21 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupannya dan 42 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Mayoritas perempuan dapat mengakses layanan persalinan dan 95 persen kelahiran dibantu oleh penolong persalinan terlatih. Namun, layanan kesehatan reproduksi tetap masih perlu perbaikan,

Ketimpangan berdasarkan wilayah pada kesehatan ibu dan anak



TUJUAN 4

PENDIDIKAN BERKUALITAS



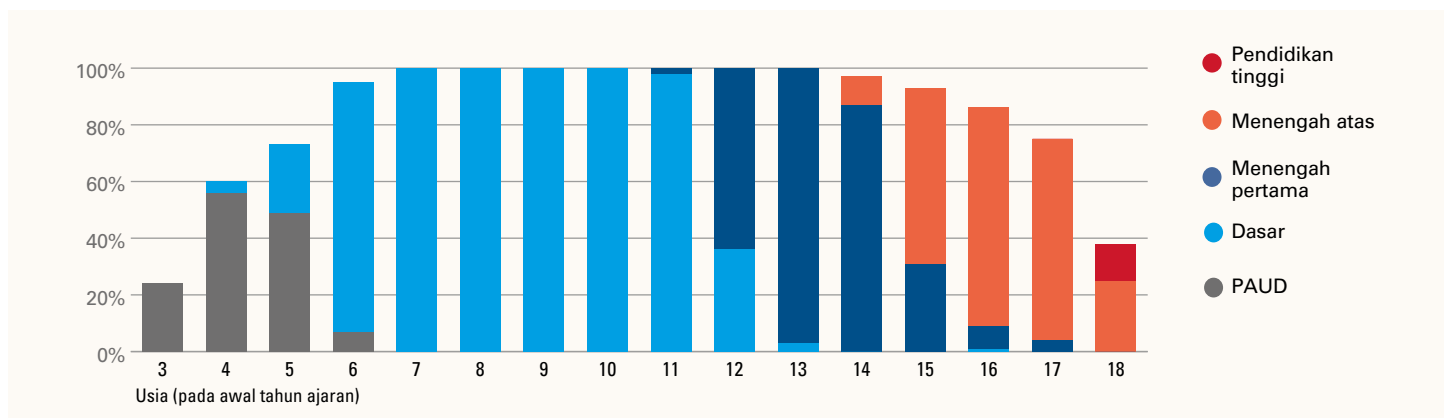
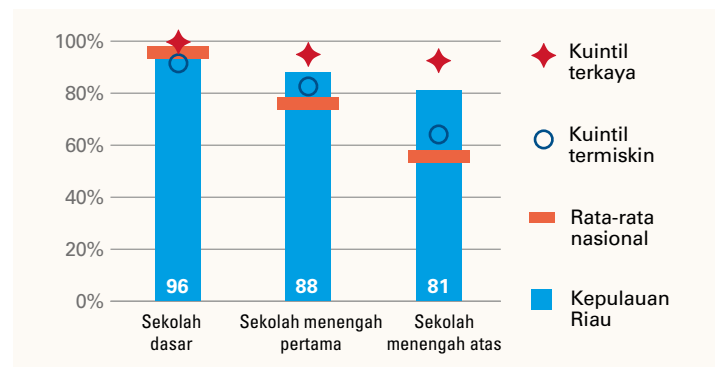
Kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar dapat ditingkatkan dengan memasukkan anak ke program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 95 persen pada tahun 2015, dan banyak di antaranya masuk sekolah dasar lebih cepat.

Provinsi Kepulauan Riau hampir mencapai akses universal pendidikan dasar. Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang lebih kaya.

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Provinsi ini berkinerja jauh lebih baik dibanding rata-rata nasional, tetapi seperempat anak sekolah dasar tidak mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan dua per tiga tidak mampu mencapai ambang batas dalam kemampuan matematika.

Persentase anak-anak yang masuk sekolah berdasarkan usia

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada angka penyelesaian sekolah



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



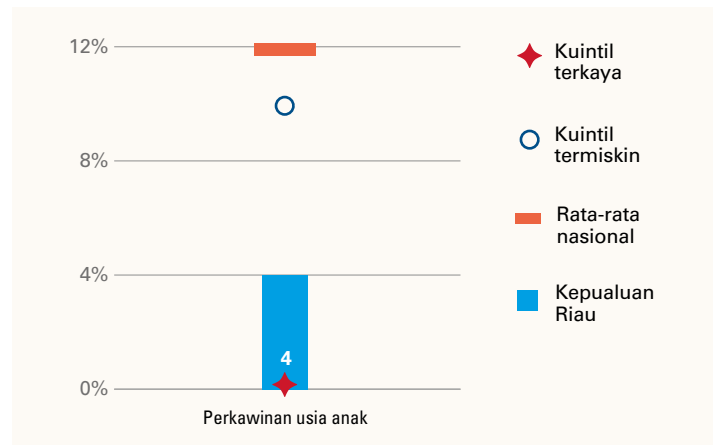
Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat perkawinan usia anak terendah di Indonesia. Sekitar 4 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2015. Tingkat pernikahan anak lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin.

Tidak ada data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat provinsi. Namun, data dari survei nasional menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini tersebar luas: Sebanyak 28 persen dari perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan oleh mantan atau pasangan intimnya saat ini.

4% perempuan menikah sebelum berusia 18



Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada perkawinan usia anak

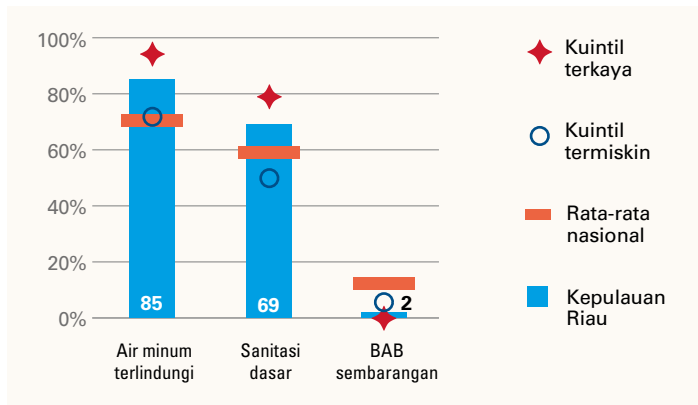


TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI



Pencapaian akses universal terhadap air minum, sanitasi, dan higienitas sangat penting untuk mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, tujuh di antara 10 orang menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah, hanya 2 persen yang mempraktikkan BAB sembarangan. Hampir dua per tiga jumlah sekolah sudah memiliki fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Akses terhadap sumber

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses air dan sanitasi



air minum yang layak sudah jauh lebih tinggi, baik di rumah tangga maupun sekolah.²

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dan tempat tinggal sangat mencolok, yang menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan ke dalam kebijakan dan praktik. Sejumlah kemajuan sudah dicapai melalui penerapan program sanitasi total berbasis masyarakat.

sekolah dengan layanan air dasar = 86%

Lingkungan sekolah

Sekolah dengan layanan air dasar (%)	86
Sekolah dengan fasilitas sanitasi terpisah menurut jenis kelamin (%)	63

Komunitas

Desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	35
--	----

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

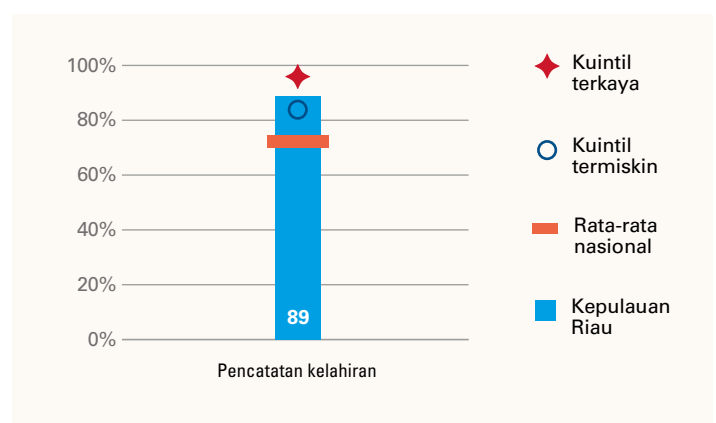


Saat ini proses peningkatan cakupan pencatatan kelahiran masih berjalan. Pada tahun 2015, hampir sembilan di antara 10 anak di bawah usia 5 tahun telah memiliki akta lahir. Masih terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan berdasarkan status kekayaan rumah tangga, yang disebabkan hambatan keuangan dan ketersediaan pelayanan (*supply-side barriers*).

Anak dalam tahanan masih menjadi bentuk hukuman yang umum bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini melanggar prinsip bahwa penahanan anak harus merupakan pilihan terakhir. Di Provinsi Kepulauan Riau, 9 persen dari seluruh anak yang ditahan belum mendapatkan putusan pengadilan, yang berarti di bawah rata-rata nasional.

Hanya ada sedikit atau tidak ada data sama sekali tentang masalah perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.

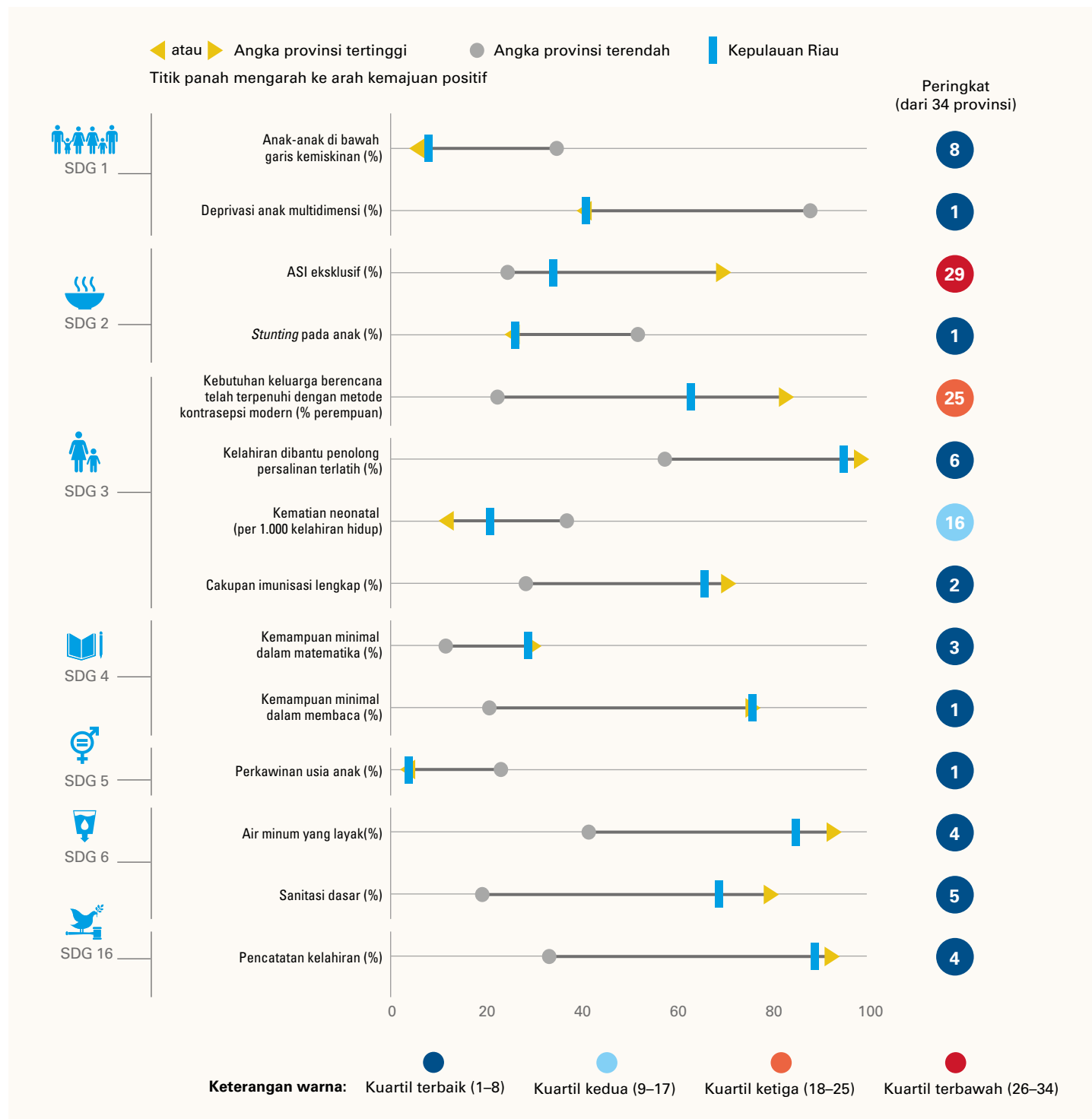
Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada pencatatan kelahiran



KARTU NILAI (SCORECARD) PROVINSI

Kartu nilai ini berisi ringkasan kinerja Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa indikator SDG dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah untuk tiap indikator.

Di sisi kanan tercantum peringkat Provinsi Kepulauan Riau untuk setiap indikator, yaitu antara peringkat 1 untuk kinerja tertinggi dan 34 untuk kinerja terendah. Data menurut provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat kuartil (biru tua untuk kuartil terbaik dan merah untuk kuartil terbawah).



Catatan

Sumber: Survei rumah tangga nasional (SUSENAS, RISKESDAS, SDKI) dan data administratif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan). Informasi terperinci tentang sumber data dan definisi indikator tersedia *online* di: <https://sdg4children.or.id>

- 1 Kemiskinan anak multidimensi didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami deprivasi pada setidaknya dua dimensi berikut: pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perumahan; air dan sanitasi; dan perlindungan.
- 2 Saat ini, Indonesia masih belum memiliki data nasional yang representatif tentang kualitas air yang dapat digunakan untuk menghitung indikator SDG terkait penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun setidaknya telah digunakan indikator *proxy* dalam menyusun *baseline data* untuk SDG 6.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di: jakarta@unicef.org